

KUMPULAN CERITA PERUBAHAN **KOMPAK** DIGITALISASI



Daftar Isi



1
Pelayanan Adminduk Tepat Sasaran
Berkat SAIK+ Papua Barat



5
SIBUBA Memastikan Ibu Hamil
Terlayani dengan Tepat



9
Data yang Akurat Mewujudkan
Desa Sejahtera



11
Data yang Mengubah Tanah Papua



13
Jurus Jitu Kabupaten Pekalongan
Tekan Kemiskinan



17
Membangun Roh Program PROSPEK



19
Menggunakan Data Desa untuk
Pengentasan Kemiskinan dan
Catatan Sipil

Pelayanan Adminduk Tepat Sasaran Berkat SAIK+ Papua Barat



▲ Di Kabupaten Manokwari Selatan, pemerintah mengandalkan SAIK+ untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial pemerintah (foto diambil sebelum pandemi).

Warga Papua Barat kini dapat menikmati pembangunan dan dukungan pemerintah yang tepat guna karena berbasis data. Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) membantu pemerintah kampung memetakan kondisi dan kebutuhan masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19, sehingga pembagian bantuan pemerintah dan program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.

Erik Piterson Ladaw selalu merasa frustrasi setiap akan menyusun program untuk pemerintah kampungnya di Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. “Semua dokumen kampung masih dalam bentuk manual, sehingga harus bongkar-bongkar dokumen untuk menyusun rencana,” keluhnya.

Data manual yang tidak terarsip rapi juga membuat banyak bantuan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Salah satu contoh kasusnya adalah seperti yang dialami oleh warga Kampung Waroser, Israel Genos Salawane. “Nama saya sudah tercatat untuk dapat bantuan, tapi akhirnya orang lain yang ambil bantuannya,” tutur Israel.

Itulah sebabnya Erik merasa seperti mendapat jawaban doa dari Tuhan, ketika diajak oleh bendahara kampungnya untuk menjadi kader Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK). "Programnya persis seperti yang saya butuhkan," kesan Erik saat mengikuti pelatihan kader SAIK pertama kali pada tahun 2017 di Kota Sorong.

SAIK merupakan sistem yang berisi data kependudukan, sosial dan ekonomi setiap warga kampung. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengembangkan sistem ini dengan dukungan KOMPAK bersama Yayasan BaKTI.

Data yang akurat di dalam SAIK menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan dana di tingkat kabupaten dan desa agar program yang dihadirkan tepat sasaran.

Pada Oktober 2019, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama KOMPAK meningkatkan kemampuan SAIK dengan menambahkan fitur integrasi data antar kampung, distrik, kabupaten dan provinsi yang dapat diakses secara *online* sehingga data kampung dapat menjadi dasar perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Hasil pengembangan ini dinamakan SAIK+.

Sementara Pemerintah Provinsi Papua mengembangkan SAIK menjadi Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua).

Erik segera bertugas melakukan pendataan masyarakat. "Saya membantu Pak Distrik untuk pendataan, jadi tugas bisa saya kerjakan bersama-sama," tutur pria berusia 31 tahun ini.

Semua warga, termasuk Israel dan keluarganya menyambut inisiatif ini. "Kader menanyakan informasi keluarga sesuai yang ada di Kartu Keluarga kemudian kader mengisi formulir pendataan. Kader juga melakukan observasi seperti melihat lantai dan kualitas rumah," papar Israel. Erik mendatangi rumah Israel dua kali untuk pemutakhiran data selama 30 menit dalam setiap kunjungan.

Data yang akurat di dalam SAIK menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan dana di tingkat kabupaten dan desa agar program yang dihadirkan tepat sasaran.

Hasil pendataan yang akurat lewat SAIK+ segera dapat dirasakan masyarakat. "Data SAIK+ sangat bermanfaat untuk menentukan siapa yang

berhak mendapatkan bantuan. Ada bantuan BLT,¹ BST,² PKH,³ bantuan dari provinsi, dan sebagainya. Termasuk juga bantuan stimulan untuk rehab rumah. Semua itu diambil dari data SAIK+," jelas Erik.

Kasus bantuan salah alamat seperti yang dialami Israel pun sudah tidak lagi terjadi. "Sekarang ada data, jadi yang mendapat adalah mereka yang namanya ada data," ujar Israel. Ia juga mengamati adanya perbaikan di desanya yang terlaksana berkat adanya pendataan kebutuhan masyarakat yang akurat. "Ada bantuan rumah untuk masyarakat yang kurang mampu. Ada juga dibangun sumur untuk yang tidak punya sumur, ada juga yang menerima bantuan pemasangan meteran listrik," ujar ayah dua anak ini memberi contoh.

Samuel Waromi (56), Kepala Kampung Waroser, mengatakan SAIK+ membantu pemerintah kampung menyusun rencana kerja serta mengatur keuangan kampung. Menurut pria yang sudah empat tahun menjabat ini, SAIK+ berisi data yang akurat sehingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) menjadi lebih realistis dan terukur.

¹ Bantuan Langsung Tunai

² Bantuan Sosial Tunai

³ Program Keluarga Harapan

“Dulu kita hanya kira-kira saja. Oh, orang itu miskin, orang itu tidak. Tapi dengan SAIK+ semua data ada. Kita bisa menilai tingkat kemiskinan satu keluarga berdasarkan data yang dikumpulkan kader kampung,” terangnya.

Manfaat SAIK+ semakin terasa di masa pandemi COVID-19. “Kami mewajibkan kepala kampung menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka pemulihan ekonomi saat pandemi COVID dengan mengacu pada data SAIK+,” tegas Yakobus Ramar, Kepala Distrik⁴ Oransbari.

Yakobus memaparkan bahwa ada 1.807 kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan BLT sebesar Rp500.000 per-KK serta BLT-Dana Desa sebesar Rp900.000 per-KK selama tiga bulan. “Data SAIK+ membantu untuk pengambilan keputusan kepada siapa bantuan tersebut akan diserahkan,” tutur Erik.

Selain itu, Kampung Waroser juga memberikan bantuan berupa pembagian bibit buah mangga dan rambutan untuk membantu produktivitas masyarakat di masa pandemi serta melakukan pembagian masker. “Kampung juga menyediakan tempat untuk isolasi. Ada juga sosialisasi dari kampung terkait pencegahan COVID,” tambah Erik. Semua, adalah bentuk perencanaan tepat sasaran dari pemerintah kampung sehingga masyarakat dapat mengatasi dampak pandemi.



▲ Erik Ladauw, Kader Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, menggunakan SAIK+ untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan masyarakat.

Manfaat SAIK+ semakin terasa di masa pandemi COVID-19. “Kami mewajibkan kepala kampung menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka pemulihan ekonomi saat pandemi COVID dengan mengacu pada data SAIK+,” tegas Yakobus Ramar, Kepala Distrik Oransbari. ■

Keberhasilan Manokwari Selatan dalam penyaluran BLT-Dana Desa mendapat apresiasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT 2015-2020, pada Webinar Sinkronisasi Data Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

yang diselenggarakan Bappenas bersama KOMPAK, 10 Juni 2020, penyaluran BLT-Dana Desa di Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2020 termasuk yang terbaik di Provinsi Papua Barat.

Kini, 1.158 kader terlatih tersebar di sekitar 579 kampung di Papua Barat yang telah mengadopsi SAIK+. Erik berharap bahwa program SAIK+ dapat terus berlanjut, bahkan semakin meluas pemanfaatannya. Ia mencontohkan kebutuhan untuk menambah fitur SAIK+ dengan data terkait ibu hamil.

“Kami di kampung kurang data untuk ibu hamil. Data seperti kesehatan ibu hamil, sudah berapa bulan usia kehamilan ibu hamil, di keluarga mana ibu hamil itu berada sehingga bisa bersinergi dengan (dinas) kesehatan,” papar ayah satu anak ini.

⁴ Distrik adalah sebutan untuk kecamatan di Papua, distrik dipimpin oleh kepala distrik atau setingkat camat. Di Papua tidak dikenal istilah desa.



Kader Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sedang memperbaharui data kampung melalui SAIK+ yang digunakan sebagai basis data PROSPPEK. ▲
(foto diambil sebelum pandemi)

Saat ini, SAIK+ digunakan untuk mendukung PROSPPEK, yang bertujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi di tingkat kampung. PROSPPEK akan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp225 juta/tahun untuk setiap kampung.

SAIK+ juga akan difokuskan sebagai dasar data bagi perhitungan anggaran Otsus oleh pemerintah provinsi mulai tahun anggaran 2023. ■

“Meningkat badan pelaksana ini baru dibentuk maka program-program PROSPPEK di Kampung Waroser akan terus berkembang

termasuk untuk memulihkan sektor ekonomi, kesehatan, dan sosial di masa pandemi COVID-19,” tutur Samuel.

Pemerintah Kampung Waroser, berencana mengisi PROSPPEK dengan membuat saluran air bersih, membantu masyarakat miskin memanfaatkan lahan pekarangan untuk kebun keluarga, dan membuat kompos dari kotoran ternak.

SAIK+ juga akan difokuskan sebagai dasar data bagi perhitungan anggaran Otsus oleh pemerintah provinsi mulai tahun anggaran 2023. “Dalam Undang-undang Otsus yang baru disebutkan bahwa jumlah Orang Asli Papua (OAP) akan menjadi dasar besaran dana Otsus yang diterima Provinsi Papua Barat,” papar

Legius Wanimbo, Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Provinsi Papua Barat.

Dengan data yang akurat, masyarakat di Papua Barat akan dapat menikmati pelayanan dasar, bantuan dan program pemerintah yang tepat sasaran.

SIBUBA Memastikan Ibu Hamil Terlayani dengan Tepat



Bidan desa memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil dan balita di posyandu Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. ▲

"Ibu Sayuti sakit perut," demikian pesan yang disampaikan kader Posyandu via telepon kepada Apriatin Eka Marta, bidan Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Apriatin yang saat itu sedang cuti melahirkan, segera membuka aplikasi SIBUBA (Sistem Informasi Ibu dan Bayi) untuk mengecek status kehamilan pasiennya itu. Ia menemukan bahwa Sayuti yang sedang hamil tua merupakan ibu hamil dengan risiko tinggi karena menderita penyakit tekanan darah tinggi.

"Pada saat itu juga saya meminta kader dan aparat desa untuk membawa Bu Sayuti langsung ke Puskesmas Wringin," tutur Apriatin yang sudah 10 tahun melayani sebagai bidan di Desa Jatisari. Kepala Desa Jatisari, Muhammad Yasin bersama kader Posyandu datang ke rumah Sayuti untuk mengantarnya ke puskesmas. Setelah mendapat pelayanan di puskesmas, Sayuti dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. H. Koesnadi Bondowoso.

SIBUBA adalah sistem pendataan dan pemantauan ibu hamil dan ibu bersalin. Data-data yang dikumpulkan mencakup data kesehatan ibu hamil, riwayat persalinan sebelumnya, riwayat vaksinasi, dan penyakit bawaan yang diderita. Sistem berbasis Android ini membantu bidan desa dan puskesmas memetakan risiko komplikasi kehamilan. Sistem ini juga membantu proses pendampingan ibu hamil melalui program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K.

Inovasi ini berawal dari Program Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan Ibu (STOP BERDUKA) yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu dan bayi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Titik Erna Erawati menyatakan bahwa angka kematian ibu melahirkan (AKI) di kabupaten Bondowoso memang cukup tinggi.

“AKI di Bondowoso rata-rata lebih tinggi dari AKI di Provinsi Jawa Timur,” terangnya. “Misalnya di tahun 2018, AKI di Bondowoso mencapai 187 per 100.000 kelahiran. Sementara AKI Provinsi Jawa Timur 91 per 100.000 kelahiran,” tutur Titik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebelumnya telah memprakarsai berbagai

terobosan untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. “Namun upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil menurunkan angka kematian ibu karena belum tersedianya data akurat guna mendukung pemantauan aktif terhadap kondisi ibu hamil, khususnya yang berisiko tinggi,” jelas Titik lagi.

SIBUBA adalah sistem pendataan dan pemantauan ibu hamil dan ibu bersalin. Data-data yang dikumpulkan mencakup data kesehatan ibu hamil, riwayat persalinan sebelumnya, riwayat vaksinasi, dan penyakit bawaan yang diderita.

Titik menjelaskan bahwa sebelum ada SIBUBA, untuk melakukan kajian kasus kematian ibu atau bayi, kabupaten harus menunggu kronologi dari Puskesmas, yang kemudian dibahas setiap 1 hingga 3 bulan dalam minilokakarya puskesmas.

Bidan pun harus melakukan rekapitulasi data secara manual terlebih dahulu sehingga informasi yang disampaikan menjadi kurang mutakhir. Apriatin menuturkan betapa ia harus menghabiskan waktu sehari-hari untuk membuat analisa kasus dengan kemungkinan kekeliruan mencapai 20 hingga 30 persen. “Dengan SIBUBA, data menjadi

lebih valid dan lebih cepat karena data di-*input real time* dan sudah terekapitulasi sehingga lebih mudah untuk dianalisis,” tutur Apriatin.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso pun bekerja sama dengan program KOMPAK, sebuah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk mewujudkan aplikasi ini pada tahun 2018.

KOMPAK mendampingi Pemkab Bondowoso melakukan serangkaian koordinasi dan *Focus Group Discussion* untuk menentukan jenis data dan calon pengguna aplikasi ini, merumuskan pembuatan aplikasi bersama *programmer* serta melakukan uji coba penggunaannya ke 13 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Bondowoso, termasuk di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Jatisari tempat Apriatin sehari-harinya memberi pelayanan kesehatan, yang adalah wilayah kerja Puskesmas Wringin.

“Kita cukup masukan NIK (Nomor Induk Kependudukan), maka akan keluar data identitas warga secara lengkap. Dari situ kita sudah terbantu untuk melihat usia ibu dan jarak dengan persalinan sebelumnya. Selain itu karena berbasis NIK maka tidak ada potensi salah data,” terang Apriatin.

“Di aplikasi ini juga tersedia fitur perencanaan persalinan untuk persiapan ketika ibu hamil akan melakukan persalinan,

seperti akan lahir di mana, calon pendonor darahnya siapa, kendaraan yang digunakan ke tempat melahirkan apa, dan juga dana apa yang akan dipakai untuk melahirkan nanti,” jelas Apriatin.

“Dengan adanya aplikasi ini sudah ada perencanaan persalinan mulai dari ibu mengetahui bahwa dirinya hamil,” tuturnya. Sebaliknya, bidan desa juga dapat memasukkan pelayanan apa saja yang telah diberikan kepada ibu hamil sampai masa nifas selesai.

Upaya ini mendapatkan sambutan dari penerima manfaat aplikasi seperti Sayuti. “Berarti Bondowoso sudah maju karena sudah ada aplikasi ibu hamil yang bisa dilihat dari HP,” respon ibu dua anak ini ketika diberi tahu akan adanya aplikasi yang datanya bisa dilihat oleh kepala desa, camat hingga bupati.

Data SIBUBA juga dapat diakses oleh kepala desa, kecamatan, puskesmas, dan pemerintah kabupaten sebagai basis perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bondowoso. Data ibu hamil beserta risikonya dalam SIBUBA disampaikan ke kepala desa dan dibahas dalam forum perencanaan pembangunan.” ■

Namun upaya penggunaan aplikasi tidaklah selalu berjalan mulus. Bekerja di area desa yang susah sinyal terutama saat musim hujan dan mati lampu membuat Apriatin sering terkendala dalam membuka aplikasi ketika akan memasukkan data. “Ponkesdes Jatisari juga belum dilalui kabel Telkom jadi belum bisa memasang jaringan *wifi*,” tuturnya. Ia harus menunggu sinyal stabil atau menumpang *wifi* di balai desa dan puskesmas untuk memasukkan data.

Kendatipun begitu, Apriatin tetap merasa manfaat aplikasi lebih besar dibandingkan kendala yang dihadapi. “Karena berbasis Android, jadi tidak perlu membawa “kohort” ke mana-mana,” tutur Apriatin mengacu pada lembaran-lembaran formulir kesehatan ibu yang biasanya diisi oleh bidan secara manual.

Bentuk aplikasi mempermudah akses data ibu hamil di mana saja dan kapan saja bagi Apriatin yang juga melakukan kegiatan Posyandu di tiga pos setiap bulan pada minggu kedua serta melakukan kunjungan rumah dan pelayanan *parenting* di PAUD Raudhotul Athfal (RA) untuk anak prasekolah.

Data SIBUBA juga dapat diakses oleh kepala desa, kecamatan, puskesmas, dan pemerintah kabupaten sebagai basis perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bondowoso. Data ibu hamil beserta risikonya dalam SIBUBA disampaikan



Bidan desa memantau perkembangan ibu hamil melalui aplikasi SIBUBA. ▲

ke kepala desa dan dibahas dalam forum perencanaan pembangunan. “Lewat forum tersebut, ditentukan bagaimana penandaan untuk ibu hamil, persiapan rujukan bagi ibu hamil yang berisiko tinggi dan sangat tinggi, menggunakan transportasi apa, juga proses untuk persiapan donor darah,” tutur Titik.

Data tersebut kemudian digunakan untuk revitalisasi program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sehingga ada pendampingan dari masyarakat untuk ibu hamil terutama yang berisiko tinggi atau sangat tinggi. “Tidak ada lagi istilah terlambat merujuk atau terlambat mendapat pertolongan,” tandas Titik.

Pada 2019, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalokasikan anggaran untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebesar Rp 270 juta atau meningkat 15 persen dari

anggaran 2018. "Ini karena kita sudah memiliki data yang akurat tentang kondisi ibu hamil di Kabupaten Bondowoso sehingga pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan," pungkas Titik.

Hasilnya, terjadi penurunan angka kematian ibu di Bondowoso, dari 19 ibu di tahun 2018 menjadi 14 ibu di tahun 2019. Namun demikian, angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 19 ibu. Pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya frekuensi pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Kini, 214 bidan desa di Kabupaten Bondowoso sudah menggunakan SIBUBA dengan harapan dapat mengurangi angka kematian ibu di tahun yang akan datang.

Berbagai fitur terus ditambahkan pada aplikasi SIBUBA, seperti data anak di bawah 2 tahun. "Rencananya ada pengembangan sehingga data SIBUBA dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Sosial (Dinsos) dan RSU," tutur Titik.

Bidan desa memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil.

Bidan desa melakukan pemeriksaan kepada ibu dan bayi yang baru dilahirkan.



Misalnya sebagai basis penyediaan alat kontrasepsi bagi ibu nifas oleh DPPKB, atau persiapan awal kebutuhan ibu hamil di RSU jika ibu hamil yang berisiko tinggi dirujuk ke RSU. Sementara Dispendukcapil dapat memetakan kebutuhan akta kelahiran dan Dinsos dapat memastikan ibu hamil yang tidak mampu dan tidak punya jaminan kesehatan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar dapat menerima bantuan sosial pemerintah.

Pada pertengahan Januari 2020, Sayuti melahirkan anak keduanya di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso. "Alhamdulillah proses kelahiran anak saya berjalan lancar," tutur Sayuti. Berkat SIBUBA, bidan desa seperti Apriatin dapat senantiasa mengawal proses melahirkan warga Bondowoso dengan risiko tinggi seperti Sayuti.



Data yang Akurat Mewujudkan Desa Sejahtera



Data terbaru yang akurat, lengkap, dan terpilah memudahkan Pemerintah Desa Rarang Selatan menyalurkan bantuan sosial. ▲

Inaq Satih (69) tersenyum sembari mengucap syukur kala menerima amplop putih berisi uang senilai Rp600.000. Tangannya yang renta membubuhkan cap jempol pada daftar penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa). Satih bersama 184 warga Desa Rarang Selatan yang umumnya terdampak kehidupan ekonominya akibat pandemi COVID-19 menerima BLT-Dana Desa tahap kedua pada Mei 2020. "Saya bersyukur dapat bantuan dari pemerintah. Sejak dulu saya belum pernah dapat bantuan," tutur Inaq Satih, yang tinggal sendiri di Dusun Gunung Nangka ini.

Menurut Muhammad, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rarang Selatan, Sistem Informasi Desa (SID) membantu pendataan penerima bantuan sosial termasuk BLT-Dana Desa. SID adalah sistem pengelolaan data dan informasi oleh pemerintah desa. SID berisi data kependudukan, pemerintahan umum, profil desa, keuangan desa, pembangunan desa, kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Sejak tahun 2016, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, mengembangkan SID dengan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan KOMPAK. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) bersama KOMPAK memfasilitasi pelatihan bagi lebih dari 200 operator SID di Lombok Timur.

Pemerintah Desa Rarang Selatan memanfaatkan SID salah satunya untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan. "Kami melakukan pendataan manual kemudian hasilnya kami masukkan satu persatu dalam SID," terang Muhammad. Pada 2017, Desa Rarang Selatan menerima data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Dinas Dukcapil.



SID membantu Pemerintah Desa Rarang Selatan merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. ▲

“Kami menandingkan data SIAK dengan SID untuk proses verifikasi dan validasi. Ternyata ada banyak warga kami yang belum memiliki dokumen kependudukan atau bahkan memiliki dokumen kependudukan ganda,” tambah Muhammad

Pemerintah desa bersama Kelompok Kerja Adminduk (Pokja Adminduk) dan Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD) kemudian membantu warga yang belum memiliki dokumen kependudukan sembari menyerahkan data kepemilikan dokumen kependudukan ganda kepada Dinas Dukcapil untuk diperbaiki.

Hasil verifikasi dan validasi inilah yang digunakan untuk memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). DTKS berisi daftar penerima Program

Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial.

SID membantu Pemerintah Desa Rarang Selatan merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran

Sejak tahun 2019, Pemerintah Desa Rarang Selatan dapat lebih mudah melakukan verifikasi dan validasi data SIAK dan DTKS lantaran sudah memiliki akun dan perangkat untuk mengakses data tersebut secara langsung. “Hasil pemuktahiran berkala itu kami unggah di website desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui penerima PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya,” tutur Muhammad.

Publikasi data penerima bantuan sosial melalui website desa memudahkan Satuan Tugas COVID-19 melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Sesuai peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BLT-Dana Desa ditujukan bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat. “Kami cukup melihat SID untuk mengetahui ada 545 orang penerima PKH dan BPNT, sehingga kami bisa fokus mendata keluarga miskin dan rentan lainnya. SID mempermudah dan mempercepat kerja kami,” terang Murniati, Koordinator Seksi Penerangan dan Sosialisasi Satuan Tugas COVID-19 Desa Rarang Selatan.

Publikasi data penerima bantuan sosial melalui website desa memudahkan Satuan Tugas COVID-19 melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. ■

SID membantu pemerintah desa meminimalkan potensi duplikasi penerima bantuan sosial. Masyarakat pun dapat melihat data penerima BLT-Dana Desa di website sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah desa.

“SID menghasilkan data yang akurat, sehingga program pembangunan desa dapat tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat,” terang Muhammad Suhirman, Wakil Ketua BPD Desa Rarang Selatan.

Data yang Mengubah Tanah Papua



Pengumpulan data kependudukan oleh Kader Kampung Waren, Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. ▲

Data adalah dasar perencanaan pembangunan sekaligus bukti sebuah pembangunan,” terang Hengky Veky Tewu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Sayangnya menurut Hengky, data yang memiliki peran penting tersebut menjadi kemewahan bagi sebagian wilayah Papua dan Papua Barat. Tantangan untuk memiliki basis data komprehensif di Papua Barat adalah kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya manusia.

“Dulu kita membangun sekolah tanpa memiliki data akurat tentang jumlah anak usia sekolah. Akibatnya sekolah kosong dan terbengkalai karena tidak ada murid,” jelasnya.

Pengalaman Hengky saat ini tinggal kenangan semenjak Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) dan Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID) diperkenalkan melalui program KOMPAK-LANDASAN II. SAIK merupakan sistem berbasis web yang berisi data kependudukan, sosial dan ekonomi setiap warga kampung. Sistem ini dapat beroperasi secara *offline* sehingga bisa dioperasikan di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi.

“SAIK dan SAID menjadi solusi yang tepat karena sistemnya sederhana dan memberdayakan sumber daya lokal,” ungkap Hengky.

Hal ini diakui oleh Sonya Ainusi, Kader Kampung Waren, Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. "Kami mendapat pelatihan dasar tentang komputer sebelum dikenalkan dengan SAIK," terangnya. Menurut perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kampung ini, SAIK mudah digunakan sehingga data-data warga kampung dapat dimasukkan ke dalam sistem oleh para kader sendiri.

SAID dan SAIK menghubungkan sektor dengan layanan. SAID dan SAIK memuat data kependudukan, sosial dan ekonomi penduduk distrik, serta cakupan layanan Puskesmas dan sekolah dasar.

Kekuatan SAIK dan SAID memang tidak lepas dari peran kader di masing-masing kampung. Hingga kini program KOMPAK-LANDASAN II telah melatih 443 kader, 112 diantaranya perempuan yang tersebar di 225 kampung di Papua dan Papua Barat. Kader SAIK dilatih untuk tidak saja mahir menginput data namun memanfaatkan data untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat.

Sistem Informasi Desa di Papua mampu mendukung perencanaan dan penganggaran kampung yang lebih transparan dan inklusif.

Kekuatan SAIK dan SAID memang tidak lepas dari peran kader di masing-masing kampung. Hingga kini program KOMPAK-LANDASAN II telah melatih 443 kader, 112 diantaranya perempuan yang tersebar di 225 kampung di Papua dan Papua Barat.

Sonya Ainusi mengalami sendiri bagaimana data kesehatan seperti golongan darah dapat menyelamatkan nyawa. "Sa sebagai perempuan, sa pikir sekali. Karna kadang ada mama-mama mau melahirkan tak ada darah. Sa bicara biaya, belum cari orang, belum transfusi, mahal sekali," tuturnya. Melihat hal ini, pemerintah kampung, Puskesmas Waren bersama

kader bergerak mengumpulkan data golongan darah masyarakat. Data ini menjadi Bank Darah Hidup yang dapat diakses oleh kader kampung maupun Puskesmas bila ada masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

SAID dan SAIK menghubungkan sektor dengan layanan. SAID dan SAIK memuat data kependudukan, sosial dan ekonomi penduduk distrik, serta cakupan layanan Puskesmas dan sekolah dasar. Data ini menjadi bahan bagi pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan dana di tingkat kabupaten dan desa agar program yang dihadirkan tepat sasaran – sehingga layanan seperti kesehatan, pendidikan dan layanan dasar lainnya dapat dihadirkan dengan lebih baik lagi.



Jurus Jitu Kabupaten Pekalongan Tekan Kemiskinan



Inovasi “Laboratorium Kemiskinan” dan pemanfaatan aplikasi SEPAKAT berkontribusi meningkatkan penghasilan para perajin gula aren Desa Botosari. ▲

Sejak 2018, Kabupaten Pekalongan menggagas “Laboratorium Kemiskinan” yang menitikberatkan penanggulangan kemiskinan berbasis data. Inovasi ini dijalankan dengan memanfaatkan aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu) yang dikembangkan Bappenas, KOMPAK, dan Bank Dunia. Data acuan yang akurat terbukti jitu dalam memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan. Tahun 2020, Kabupaten Pekalongan pun diganjar penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Bermukim satu kilometer dari bibir pantai, banjir rob selalu menjadi mimpi buruk Timbul Trijaya (43) dan keluarganya. Rumah sederhana mereka di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, tergenang air dengan ketinggian sekitar 50 sentimeter. Jika ketinggian air mencapai lebih dari satu meter, Timbul dan warga lainnya terpaksa mengungsi ke lokasi yang disediakan pihak desa dan kecamatan. Air baru surut satu minggu, bahkan satu bulan kemudian.

Keterbatasan finansial memaksa Timbul dan keluarganya bertahan tinggal di rumah mereka selama hampir dua dekade. Sehari-hari, Timbul mencari nafkah sebagai perangkat desa dengan upah minim. Istrinya, Sarofah, bekerja sebagai penjahit harian lepas. Selain kebutuhan pokok sehari-hari, mereka harus menanggung biaya pendidikan ketiga anaknya yang duduk di bangku TK, SD, dan SMA.

Suatu hari, tim peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mendatangi Timbul untuk mendata rumah-rumah target rehabilitasi. Pendataan ini dilakukan sebagai implementasi dari inovasi “Laboratorium Kemiskinan” dan aplikasi SEPAKAT untuk membantu Pemkab Pekalongan menentukan prioritas penerima bantuan sosial.

Dua bulan kemudian, keluarga Timbul menerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. “Setelah mendapat bantuan RTLH, rumah kami tidak banjir lagi, tidak bocor, makin teduh, udara bersirkulasi, bahkan sekarang punya Mandi,

Cuci, Kakus (MCK) sendiri sehingga baik bagi kesehatan kami sekeluarga,” tutur Timbul.

Inovasi “Laboratorium Kemiskinan” dan pemanfaatan aplikasi SEPAKAT juga berkontribusi meningkatkan penghasilan para perajin gula aren Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

Inisiatornya, Diyono (39), merupakan perajin gula aren sekaligus pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perajin Gula Aren Lestari (Pagar). Diyono dan istrinya sudah cukup lama prihatin dengan kesejahteraan para perajin aren yang tak kunjung pulih. Minat generasi muda untuk *nderes* atau mengambil nira aren berangsur surut. Pekerjaan ini dianggap tidak menjanjikan masa depan.

Hasil pendataan “Laboratorium Kemiskinan” dan aplikasi SEPAKAT terhadap permasalahan Diyono dan para perajin aren mendorong Pemkab Pekalongan memediasi Diyono untuk mengikuti Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK), program kerjasama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Diyono dan para perajin aren mendapat pelatihan supaya mampu mengolah aren menjadi gula kristal atau gula semut beraneka rasa.

“Kami juga diajar cara mengemas yang baik hingga punya merek sendiri yaitu Gula Aren *Semut Nethes*. Pemkab memfasilitasi pengurusan Izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikat halal MUI. Cara memasarkannya kami pelajari lewat seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop Jawa Tengah. Hasilnya, konsumen bisa membeli langsung produk-produk kami di toko ritel, termasuk minimarket dan toko *online*. Harga jual produk aren kami pun terdongkrak dari Rp 14.000 menjadi Rp 20.000 per kilogram,” terang Diyono.

Inovasi “Laboratorium Kemiskinan” digagas Pemkab Pekalongan sejak 2018. Tujuan utamanya adalah menekan angka kemiskinan dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan permukiman. Melalui inovasi ini, Pemkab mengumpulkan



Salah satu rumah warga Botosari, yang menerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berkat pemanfaatan aplikasi SEPAKAT dan Laboratorium Kemiskinan. ▲

data dari desa-desa miskin sebagai modal awal untuk memetakan potensi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Data-data inilah yang kemudian menjadi titik tolak untuk menggali potensi-potensi ekonomi kemasyarakatan – seperti halnya KUBE Pagar dengan potensi gula arennya.

Pada tahap awal, “Laboratorium Kemiskinan” berlangsung di tiga desa yakni Botosari, Kertijaya, dan Mulyorejo. Untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data serta penentuan intervensi yang akurat, “Laboratorium Kemiskinan” memanfaatkan aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama KOMPAK dan Bank Dunia.

Pengembangan SEPAKAT bermula dari keinginan Bappenas pada 2016 untuk menggabungkan beberapa aplikasi yang mendukung program penanggulangan kemiskinan yaitu *Pro Poor Planning Budgeting and Monitoring* (P3BM) dan Sistem Informasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (SIMPADU). Pada 2017, Bank Dunia juga mengembangkan *Sub National Poverty Assessment* (SNAPA) yang telah diuji coba di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bogor.



Bersama KOMPAK dan Bank Dunia, Bappenas merumuskan modul-modul aplikasi yang kemudian diberi nama SEPAKAT yang menjadi platform penganalisa kemiskinan di suatu kabupaten hingga ke tingkat mikro.

Bersama KOMPAK dan Bank Dunia, Bappenas merumuskan modul-modul aplikasi yang kemudian diberi nama SEPAKAT. Aplikasi SEPAKAT terdiri dari fitur-fitur yang membantu Pemerintah Daerah membuat perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). Aplikasi ini menyediakan perangkat analisis untuk mengolah data-data kemiskinan per sektor sekaligus mengevaluasi masalah-masalah kemiskinan secara terpadu dan akurat.

SEPAKAT tetap memberi ruang pada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menentukan pilihan intervensi solusi sesuai karakter dan kebutuhan daerahnya. Aplikasi ini dirancang mampu beradaptasi dengan regulasi yang menjadi acuan bagi provinsi/kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang “Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah”.

Pembenahan basis data dan analisis cepat yang ditawarkan aplikasi SEPAKAT diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Pemda dapat mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

KOMPAK berperan menyediakan tenaga ahli untuk memberi masukan teknis terkait pengembangan aplikasi serta melatih tim Bappenas yang akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan aplikasi SEPAKAT. Sejak SEPAKAT diluncurkan pada Mei 2018, Bappenas telah melatih 185 kabupaten/kota dan 11 provinsi. KOMPAK juga turut mendampingi dan memantau pemanfaatan aplikasi SEPAKAT dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di sejumlah kabupaten.

Inovasi Laboratorium Kemiskinan pun mengantar Kabupaten Pekalongan memenangkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 2020. ■

“KOMPAK memberikan pelatihan aplikasi SEPAKAT untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aplikasi ini sangat membantu kami menemukan dan menentukan prioritas masalah, sekaligus mencari solusi pengentasan kemiskinan yang cocok untuk daerah kami,” terang Didin Nasruddin (45), Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan.

Setelah menguasai cara penggunaan aplikasi, Didin segera memanfaatkannya untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Aplikasi berbasis data ini juga diakui Didin mempermudah pekerjaannya menentukan lokasi, sasaran, dan intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Hasilnya, Bappeda

tidak kesulitan menemukan dan menolong warga yang benar-benar membutuhkan seperti Timbul dan keluarganya di Desa Mulyorejo, juga para perajin gula aren di Desa Botosari.

Berjalan lebih dari dua setengah tahun, sejumlah inovasi yang dilahirkan “Laboratorium Kemiskinan” mampu menekan angka kemiskinan di tiga desa sasaran. Rumah tangga miskin di ketiga desa tersebut berkurang dari 1.425 menjadi 1.120 rumah tangga. “Laboratorium Kemiskinan” juga berhasil mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari 348 menjadi 86 rumah.

Inovasi “Laboratorium Kemiskinan” pun mengantar Kabupaten Pekalongan memenangkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 2020. Kementerian PANRB menilai inovasi ini menunjukkan keseriusan Pemkab Pekalongan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sepanjang 2021, Pemkab Pekalongan memperluas inovasi “Laboratorium Kemiskinan” hingga menjangkau delapan desa. Selain Mulyorejo dan Botosari, desa-desa yang dijangkau antara lain

Windurojo (Kecamatan Kesesi), Gembong (Kecamatan Kandangserang), Pedawang (Kecamatan Karanganyar), Kertijayan (Kecamatan Buaran), Jeruksari (Kecamatan Tirto), dan Kedungwuni (Kecamatan Kedungwuni). Desa-desa ini menjadi sasaran setelah mempertimbangkan tingginya kasus *stunting* dan anak tidak sekolah yang muncul dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Wujud inovasi “Laboratorium Kemiskinan” yang dijalankan di desa-desa tersebut meliputi program pelatihan kerja dan pemberian alat bantu kerja, pembenahan RTLH, jambanisasi, penyediaan air bersih, penanganan anak tidak sekolah, dan penanganan individu dengan disabilitas.

“Pelatihan kerja dan pemberian alat bantu kerja tidak hanya untuk UMKM tapi juga individu yang masih produktif namun berpenghasilan rendah. Terkait penanganan anak tidak sekolah, intervensi yang dilakukan termasuk program sekolah gratis serta pemberian seragam, sepatu, dan alat tulis. Bagi penyandang disabilitas, intervensi yang dilakukan meliputi pemberian kursi roda, alat bantu dengar, juga bantuan pelatihan kerja sesuai jenis disabilitasnya,” papar Didin Nasruddin.

Membangun Roh Program PROSPPEK



Dengan dukungan dari kader kampung, pembangunan di Papua Barat akan lebih terencana. ▲

"Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merencanakan program pembangunan," terang Markus Waran, Bupati Manokwari Selatan.

Keunggulan SAIK Plus yang dibangun KOMPAK bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Sorong, Fakfak, dan Kaimana sejak 2017 inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat mengadopsi SAIK Plus guna mendukung Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) di seluruh 13 kabupaten/kota mulai 2020.

PROSPPEK adalah program yang bertujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi di tingkat kampung dengan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) sebesar Rp225 juta/tahun untuk setiap kampung.

Selain menyediakan basis data sosial, kependudukan, dan ekonomi masyarakat yang akurat, SAIK Plus mampu meningkatkan kerja sama lintas sektor (pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kampung) yang dikawal oleh kepala distrik untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan dasar. ■

SAIK Plus sebagai platform digital untuk menyimpan dan memutakhirkan data sosial, kependudukan, dan ekonomi masyarakat yang dikelola kader kampung berperan menyediakan data akurat bagi pemerintah kampung supaya kegiatan perbaikan layanan dasar dan peningkatan ekonomi dapat tepat sasaran.

Sampai saat ini sebanyak 87 kampung di Provinsi Papua Barat telah mengembangkan dan memanfaatkan SAIK Plus yang dikelola oleh 92 kader kampung (70 laki-laki dan 22 perempuan) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

“Selama ini kami mengandalkan SAIK Plus untuk membantu pemerintah kampung merencanakan program pembangunan yang lebih baik dengan menyediakan basis data yang bisa diakses masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat untuk mengelola pembangunan kampung,” tutur Yakobus Ramar, Kepala Distrik Oransbari.

Pada April 2020, Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan dukungan KOMPAK melakukan penyesuaian desain PROSPPEK sebagai respons pada situasi pandemi COVID-19. ■

Selain menyediakan basis data sosial, kependudukan, dan ekonomi masyarakat yang akurat, SAIK Plus mampu meningkatkan kerja sama lintas sektor (pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kampung) yang dikawal oleh kepala distrik untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan dasar. “Misalnya kami kumpulkan data kasus malaria di kampung. Data itu dipakai puskesmas untuk membuat program pencegahan

malaria yang lebih terarah,” jelas Paulus Kawey, Kader SAIK Kampung Oransbari Pantai.

Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah mengembangkan SAIK Plus ke seluruh 1.742 kampung untuk mendata Orang Asli Papua (OAP). “Sehingga dana dan implementasi otonomi khusus di Papua Barat dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi orang-orang asli Papua,” ungkap Legius Wanimbo, Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat.

Pada April 2020, Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan dukungan KOMPAK melakukan penyesuaian desain PROSPPEK sebagai respons pada situasi pandemi COVID-19. “Kita menyesuaikan kembali regulasi dan petunjuk pelaksanaan PROSPPEK. Diantaranya mewajibkan kampung untuk menggunakan dana PROSPPEK untuk kegiatan pencegahan COVID-19 dan membantu anak-anak mengikuti pembelajaran jarak jauh,” terang Hilda Eveline, Provincial Manager KOMPAK untuk Papua dan Papua Barat.

Menggunakan Data Desa untuk Pengentasan Kemiskinan dan Catatan Sipil



Sistem informasi desa (SID) menjadi alat efektif dalam memperkuat program pengurangan kemiskinan dan meningkatkan catatan sipil. ▲


Sejak 2016, KOMPAK mendukung Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, membangun sistem informasi desa (SID). KOMPAK mulanya hanya membantu penerapan SID di dua kecamatan. Berkat keberhasilan uji coba ini, pemerintah kabupaten kemudian mengembangkannya ke semua desa di wilayahnya. Alhasil, seluruh desa di Pacitan kini memiliki sistem informasi desa yang sepenuhnya didanai pemerintah kabupaten.

Menurut Agus Hartanto, operator SID di Desa Bubakan, sistem ini telah terbukti menjadi alat efektif dalam memperkuat program pengurangan kemiskinan dan meningkatkan catatan sipil.

“SID menghasilkan data yang sangat membantu kami merencanakan program yang lebih inklusif. Misalnya, kami bisa menggunakan SID untuk mengetahui apakah seseorang termasuk dalam kategori dan apakah ia sudah memperoleh bantuan atau tidak. Data ini membantu kami mengidentifikasi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan,” jelas Hartanto. “Setiap tahun, kami melakukan survei terhadap warga desa. Survei ini memberi informasi tentang status pernikahan; jenis pekerjaan dan

tingkat pendapatan; kepemilikan berbagai jenis dokumen, seperti akta kelahiran atau kartu keluarga; atau status kecacatan atau penyakit kronis tiap warga. Kami juga mengumpulkan informasi tentang kondisi rumahnya, apakah memiliki anak dan mereka bersekolah atau tidak, serta banyak lagi data lainnya.”

Sistem informasi desa adalah salah satu dari enam bidang prioritas KOMPAK. Selanjutnya KOMPAK akan berfokus untuk memastikan SID didanai, diperbarui secara berkala, dan digunakan secara efektif untuk meningkatkan perencanaan, penganggaran, dan kegiatan pembangunan.



Pemerintah kabupaten bisa dan telah menggunakan semua informasi ini untuk mendorong agar dampak pembangunan dirasakan bagi kelompok masyarakat paling miskin. Hal ini berkat kemampuan SID menyediakan data untuk membuat berbagai keputusan berdasarkan informasi diantaranya tentang di mana harus melakukan lebih banyak kunjungan penjangkauan untuk layanan identitas hukum, identifikasi populasi termiskin dan paling rentan untuk program perlindungan sosial, dan bagaimana menasar anak-anak putus sekolah dengan lebih baik.

Sistem informasi desa adalah salah satu dari enam bidang prioritas KOMPAK. Selanjutnya KOMPAK akan berfokus untuk memastikan SID didanai, diperbarui secara berkala, dan digunakan secara efektif untuk meningkatkan perencanaan, penganggaran, dan kegiatan pembangunan.

